

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pengertian modal asing dalam undang – undang tersebut (Jufrida, 2016), yaitu sebagai berikut:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang – undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan arus modal yang didapatkan dari pihak luar yang bergerak ke bidang dari Investasi Asing. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengartikan Penanaman Modal Asing seperti investasi yang dijalankan oleh perusahaan di dalam negara terhadap perusahaan di negara lain demi keperluan mengolah operasi perusahaan di negara tersebut (Arifin dkk, 2008 dalam Fadilah, 2017). Menurut Ma'ruf dan Wihastuti (2008), teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008). Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma'ruf dan Wihastuti, 2008).

2.1.2 Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pemerintah selalu mengusahakan agar aliran modal yang masuk ke Indonesia semakin tinggi, hal ini agar sesuai dengan harapan yaitu semakin besarnya dana yang diperlukan dalam pembangunan, utamanya bagi pembangunan dalam bidang ekonomi. Pemerintah selalu berupaya dalam menarik dana investor asing dengan mempermudah kegiatan investasi melalui berbagai kebijakan sesuai dengan kebutuhan dana pembangunan tersebut. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibentuk pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam UU ini, yang dimaksud dalam Penanaman Modal Asing (PMA) hanya investasi yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dijalankan berdasarkan ketentuan UU yang ditetapkan dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Dengan pengertian bahwa secara langsung pemilik modal yang menanggung resiko dari penanaman modal asing tersebut. Adapun yang dibahas pada Undang-Undang ini yaitu sebagai berikut (Malik dan Kurnia, 2017):

- a. Undang-Undang ini dengan jelas hanya mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan tidak mengatur kredit atau peminjaman modal.
- b. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut berkesempatan untuk menjalankannya menggunakan modal asing sebelumnya.
- c. Penanaman modal asing (Foreign direct investment) dalam hal ini tidak hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala kebutuhannya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia.

d. Investor secara penuh menanggung Penggunaan kredit dan resikonya.

2.1.3 Bentuk-bentuk Investasi Asing

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu:

a. **Investasi Portofolio:** Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru (Anoraga, 2006 dalam Jufrida dkk, 2016).

b. **Investasi Langsung:** Penanaman modal asing (PMA) atau Foreign direct investment (FDI) terdiri dari aset – aset nyata yaitu pembelian tanah yang digunakan sebagai sarana produksi, pembangunan pabrik, pembelanjaan peralatan inventaris didampingi dengan fungsi – fungsi manajemen yang ada (Ningrum dan Indrajaya, 2018).

Investasi portofolio dengan penanaman modal asing mempunyai perbandingan yaitu banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh penanaman modal asing sifatnya jangka panjang, dalam pembukaan lapangan kerja yang baru, dan memberikan kontribusi dalam alih teknologi dan keterampilan manajemen. Penanaman modal asing juga dapat memodernisasi masyarakat dan memperkuat

sektor swasta. Penggunaan modal asing penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara yang berkembang (Jhingan, 2000 dalam Ningrum dan Indrajaya, 2018). Investasi akan terus dijalankan apabila produktifitas batas dari investasi itu masih lebih tinggi daripada tingkat yang akan diterimanya melalui dipinjamkan dan tidak diinvestasikan (Sobri, 1984 dalam Ningrum dan Indrajaya, 2018).

2.2 pengeluaran pemerintah

2.2.1 Pengertian pengeluaran pemerintah

pengeluaran pemerintah merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). pengeluaran pemerintah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. pengeluaran pemerintah adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2006). pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kategori pengeluaran pemerintah menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.2.2 Jenis-Jenis pengeluaran pemerintah

a. pengeluaran pemerintah Tanah pengeluaran pemerintah Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. pengeluaran pemerintah Peralatan dan Mesin pengeluaran pemerintah Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. pengeluaran pemerintah Gedung dan Bangunan pengeluaran pemerintah Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. pengeluaran pemerintah Jalan, Irigasi dan Jaringan pengeluaran pemerintah Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. pengeluaran pemerintah Fisik lainnya pengeluaran pemerintah Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria pengeluaran pemerintah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah pengeluaran pemerintah kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara singkat, menurut Julius R. Latumaerissa (2015:23). pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yang perlu digaris bawahi, yaitu proses output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output perkapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena

output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output perkapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun bahkan bisa lebih lama lagi). Kenaikan output perkapita dalam satu atau dua tahun kemudian diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah suatu “ceritera” logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal yaitu,

1. Mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.
2. Mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berintraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah Pendapatan Nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu bangsa, ia cukup representatif dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tapi juga membandingkannya dengan negara lain. Rinciannya secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka pendapatan Nasional selanjutnya dapat pula diperoleh ukuran turunan (derived measures)-nya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Dumairy (1996:37).

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Didalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah menjadi jalan hidup bangsa dari masing-masing negara. Pemerintah dapat jatuh atau kuat berdiri tergantung pada rendah atau tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya, yang diukur berdasarkan peringkat nilai tertentu yang ditetapkan oleh standar ukuran dunia. Seperti telah kita lihat, program pembangunan negara-negara dunia ketiga seringkali dinilai berdasarkan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasionalnya. Dalam kenyataannya, selama bertahun-tahun kebijakan ekonomi yang konvensional menyamakan “pembangunan” dengan kecepatan total tingkat pertumbuhan dalam produksi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun.

2.4 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.4.1 Teori Klasik

Teori klasik adalah pembangunan ekonomi yang dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika keuntungan meningkat, tabungan akan meningkat, dan investasi juga akan bertambah. Menurut pemikiran klasik, pada kondisi seperti ini perekonomian mengalami tingkat kejenuhan atau keadaan stasioner. Ini adalah sebuah keadaan dimana perekonomian telah dewasa, mapan dan masyarakat telah sejahtera, tetapi tanpa perkembangan lebih lanjut. Beberapa teori klasik tersebut antara lain sebagai berikut.

2.4.1.2. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut teori ini, ada tiga faktor penentu proses produksi/ pertumbuhan yaitu SDA, SDM, dan barang modal.

2.4.1.3. Teori pertumbuhan David Ricardo

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah (atau minimal). David Ricardo juga melihat adanya perubahan teknologi yang selalu terjadi, yang membuat meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses diminishing return kemerosotan tingkat upah dan

keuntungan ke arah tingkat minimumnya. David Ricardo juga melihat pertanian sebagai sektor utama sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

2.4.1.4 Teori Pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu jika PNB potensialnya meningkat. Sektor yang dominan adalah pertanian dan industri. Jika output di kedua sektor tersebut ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa ditingkatkan. Ada dua kelompok faktor yang sangat menentukan pertumbuhan, yaitu faktor-faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Dan faktor-faktor nonekonomi seperti keamanan atas kekayaan, konsistensi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tulus T.H Tambunan (1996:41).

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

2.4.2 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi, para ekonomi klasik mengembangkan beberapa faktor yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut pembahasan faktor penentu pertumbuhan ekonomi:

a. Barang Modal

Agar ekonomi mengalami pertumbuhan, stok barang modal harus ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan melalui investasi. Oleh karena itu salah satu upaya dalam meningkatkan investasi adalah dengan mendorong peningkatan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah investasi.

b. Tenaga Kerja

Khusus di negara berkembang, tenaga kerja (TK) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi pernyataan adalah berapa banyak penambahan TK akan terus meningkat output. Selama ada sinergi antara TK dan teknologi, penambahan TK akan memacu pertumbuhan Ekonomi.

c. Teknologi

Kemajuan teknologi akan melahirkan trade off terhadap kesempatan kerja. Selain itu, kemajuan teknologi makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya antara negara maju dengan negara berkembang. Untuk mengatasi ketimpangan antara tenaga kerja dan teknologi, beberapa ekonom mengajukan konsep berupa teknologi tepat guna. Dengan penggunaan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada dalam diri dan lingkungannya.

d. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia, makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.

e. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi yang tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi tinggi namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

f. Kewirausahaan

Kewirausahaan secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan. Para wirausahawan/pengusaha harus mempunyai perkiraan yang matang bahwa input yang dikombinasikannya akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga timbal baliknya akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Zaini Ibrahim (2014:81).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pengaruh investasi (PMA) dan pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

1. Fenny Fithri Ramadhani (2018) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, pengeluaran pemerintah, Angkatan Kerja dan PAD Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang diteliti investasi, pengeluaran pemerintah, angkatan kerja dan PDRB. Analisis yang digunakan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan signifikan antara variabel investasi, pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja terhadap PDRB secara parsial dan simultan.
2. Novita Linda Sitompul (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB Sumatera Utara
3. Rustiano (2008) dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan data tahunan dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (OLS). Hasil analisis yang ditunjukkan pada penelitian ini bahwa secara parsial dan simultan variabel independen angkatan kerja, investasi dan

belanja pemerintah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

4. Eunike Elisabeth Bawuno, Josep Bintang Kalangi, Jacline Sumual (2015) dengan judul PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). asil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.
5. Jurie Manopo Senewe (2016). Dengan judul ANALISIS PENGARUH INVESTASI SWASTA, pengeluaran pemerintah DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2005 - 2014. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasadan Tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa.
6. Maikel Humiang, Vekie Rumate, Steeva Tumangkeng (2015). Dengan judul ANALISIS PENGARUH INVESTASI SWASTA, BELANJA MODAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN

EKONOMI DI KOTA MANADO TAHUN 2003-2012. Berdasarkan hasil penelitian maka di dapat hasil, Investasi swasta berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado sedangkan Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota manado.

7. Roni Mauliansyah, Zainuddin Mard (2017). Dengan judul Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini adalah investasi dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB aceh secara parsial dan Bersama-sama.
8. Fenny Fithri Ramadhani (2018). Dengan judul Analisis Pengaruh Investasi, [pengeluaran pemerintah](#), Angkatan Kerja dan PAD Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2016. Hasil menunjukkan bahwa variabel investasi, pengeluaran pemerintah, angkatan kerja dan PAD sektor pariwisata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat. Berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:

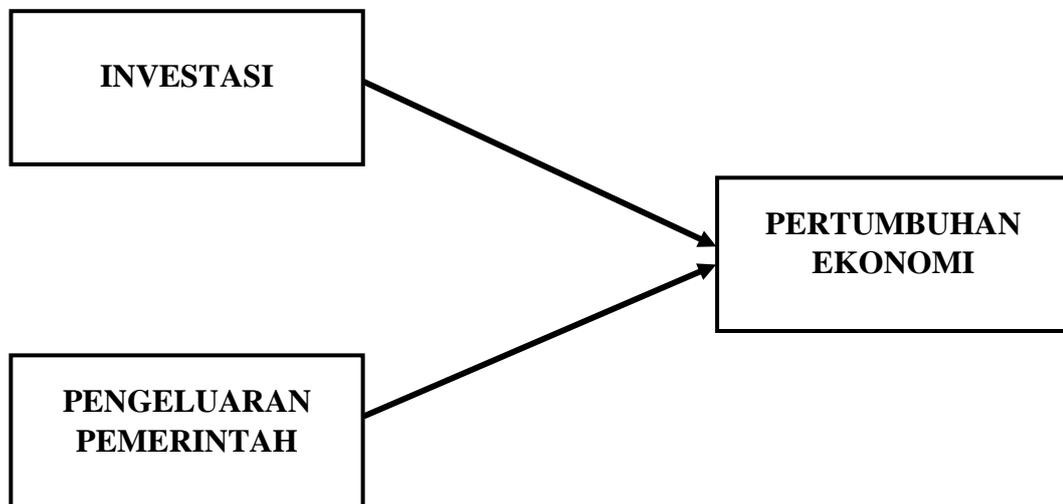
2.6.1 Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi memiliki hubungan dengan pendapatan negara secara positif. Jika investasi banyak dilakukan maka semakin banyak pula pendapatan negara yang dihasilkan dari proses investasi tersebut. Investasi juga dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan meningkatkan stok modal, sehingga akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat dari adanya pembentukan modal tersebut. Dari penjelasan tersebut maka investasi akan meningkatkan PDRB dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara (Imaniar 2018).

2.6.2 Hubungan pengeluaran pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran ditujukan untuk mencapai stabilitas perekonomian yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Sebagai negara berkembang, pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi yang salah satunya dilakukan di Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah yang merupakan kebijakan fiskal yaitu sebuah tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah di setiap tahunnya. Sehingga pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang (Azwar 2016). Pemerintah dapat mempengaruhi PDRB secara nyata dengan merubah persediaan dari berbagai macam faktor yang digunakan dalam produksi, yaitu melalui berbagai jenis pengeluaran seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga dari hal tersebut PDRB akan mendorong pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu peneliti yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris . Dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang

bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan peneliti dibanding ini , maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dari investasi (PAM) dan pengeluaran pemerintah secara Bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat periode tahun 2011-2020.
2. Terdapat pengaruh yang positif dari investasi dan pengeluaran pemerintah secara persial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat priode tahun 20011–2020.